

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III TAHUN
2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**





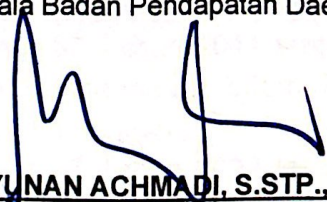
**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62211
Telp.(0322)321414 Fax:322603,E-mail:Bapenda@lamongankab.go.id
Web Site : www. lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	1028
TANGGAL TERBIT	:	31 Desember 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p> Anisa Fatmawati Kohari NIP. 20001117 202302 2 001 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</p>
Diperiksa	:	<p>Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p> Devvy Pramasti Wulandari, S.STP. M.PSDM. NIP. 19921217 201609 2 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p> <u>EDY YUNAN ACHMADI, S.STP., M.Si.</u> NIP. 198010271999121001 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpin, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III Tahun 2025 sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan dinamika makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi.	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Badan	Juni&Juli 2025	November 2025	Akan dilaksanakan penyusunan target PAD dengan kajian potensi pajak daerah
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Sosialisasi kebijakan/nomenklatur baru terkait pajak daerah dan retribusi daerah secara masif, dan monev OPD penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang	Setiap Triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	Sudah dilaksanakan
2	Kerja sama dengan pihak akademis dalam pembuatan kajian ilmiah makroekonomi daerah dalam menetapkan	Rapat Koordinasi, Surat Menyurat	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Juni & Juli 2025	November 2025	Akan dilaksanakan kerja sama dengan akademisi dalam pembuatan kajian ilmiah dalam penetapan target PAD tahun 2026

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	target PAD					
3	Melakukan digitalisasi pendataan objek pajak daerah secara integrasi (bisa berbasis lokasi seperti GIS)	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
4	Membuat jadwal dan sosialisasi interaktif dan masif melalui media sosial	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan
5	Memelihara server secara berkala	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan
6	Menyediakan fitur untuk koreksi atau pembaruan data oleh petugas lapangan atau WP secara mandiri dengan otorisasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
7	Mengadakan diklat teknis penilaian PBB P-2	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2025	Januari, Maret, Juni, Desember 2025	Sudah dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
8	Mengembangkan sistem berbasis GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis.	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan
9	Perjanjian Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Triwulan 1 (Januari-Maret 2025)	Oktober 2025	Sudah dilaksanakan
10	Pemeliharaan sistem berkala, monitoring server secara rutin	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan
11	Petugas diberikan pelatihan berkala tentang penerapan SOP Pengawasan Pajak Daerah	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan
12	Memberikan insentif fiskal dan sanksi untuk keterlambatan pembayaran	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	Sudah dilaksanakan
13	Menambah SDM dalam menangani keberatan dan pengurangan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2025	Januari 2025	Sudah dilaksanakan
14	Penetapan sanksi	Surat Menyurat dan	Kepala Bidang	Januari-	Januari-	Sudah dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	administratif secara tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan pelatihan terhadap SDM pemeriksa dan pengawasan secara merata	Rapat Koordinasi	Pengawasan dan Pelaporan	Desember 2025	Desember 2025	
15	Pengembangan sistem pembayaran digital untuk pembayaran semua retribusi daerah	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan
16	Menyediakan SDM IT pendamping untuk membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan

B. HASIL ANALISIS RISIKO

Risiko			Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersusun		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Objek Pajak yang Disediakan NUP nya		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penilaian dan Verifikasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Efektivitas Transaksi Pemerintah Daerah	
No	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO.25.37.08.01		ROO.25.37.08.01		ROO.25.37.08.02		ROO.25.37.08.03		ROO.25.37.08.04		ROO.25.37.08.05		ROO.25.37.08.06		ROO.25.37.08.07		ROO.25.37.08.08		ROO.25.37.08.09		ROO.25.37.08.10		ROO.25.37.08.11		ROO.25.37.08.12		ROO.25.37.08.13		ROO.25.37.08.14		ROO.25.37.08.15		ROO.25.37.08.16	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
1	nauev andryan saputra	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
2	artha wulandari	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
3	sinda sriwinanti	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
4	Devvy Pramasti Wulandari	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
5	Elly widia estuti	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
6	bagus	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
7	anisa kohari	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
8	fendy	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
9	Aff aliy	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
10	Krisna	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
11	A. Fatonil Firmans	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
12	Raka	Beden Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4

Risiko			Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersusun		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemertan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIDP nya		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguatan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengembangan Elektronik/Kelembagaan Transaksi Pemerintah Daerah	
No	Nama Peserta PGD	Asal Unit Kerja	RSO 25.37.08.01		ROO 25.37.08.01		ROO 25.37.08.02		ROO 25.37.08.03		ROO 25.37.08.04		ROO 25.37.08.05		ROO 25.37.08.06		ROO 25.37.08.07		ROO 25.37.08.08		ROO 25.37.08.09		ROO 25.37.08.10		ROO 25.37.08.11		ROO 25.37.08.12		ROO 25.37.08.13		ROO 25.37.08.14		ROO 25.37.08.15		ROO 25.37.08.16	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
46	Heru Setyawan	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
47	sumu herdanata	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
48	devil shulikhatus malufu	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
49	muhammad rudyanto	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
50	dimas andriyanto	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
51	ahmad firdi romdhon	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
52	sulfi	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2	3	3	2	3	4	4	3	4
53	widia ratna sari	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
54	Nirvano Ingrat	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	5	3	4
55	Ravi Astutik	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
Rata-rata			4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	5

Risiko			Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersusun		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penulisan dan Penjabaran Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Objek Pajak yang Diselesaikan N/O P nya		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Elektronik/Transaksi Pemerintah Daerah	
No	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 25.37.08.01		ROO 25.37.08.01		ROO 25.37.08.02		ROO 25.37.08.03		ROO 25.37.08.04		ROO 25.37.08.05		ROO 25.37.08.06		ROO 25.37.08.07		ROO 25.37.08.08		ROO 25.37.08.09		ROO 25.37.08.10		ROO 25.37.08.11		ROO 25.37.08.12		ROO 25.37.08.13		ROO 25.37.08.14		ROO 25.37.08.15		ROO 25.37.08.16	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
13	Anik K	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
14	Muchlis	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
15	Vita Lutfatul Ruhmah	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
16	Rizal Segur Permata	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
17	taufiqatul kharimah	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
18	vica roza	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
19	Ivan arand ardyana	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
20	emv prasastiati	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
21	mohammed samsul arifin	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
22	muchafe uba	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
23	Nedya Apriliana	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
24	sukowo	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
25	yusfo setio utomo	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
26	Widia Ratna Sari	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	5
27	Iham	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
28	ainulizzati rachmawati	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4

Risiko			Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersusun		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelesaian dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Objek Pajak yang Diselesaikan NUOP nya		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
No	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO.25.37.08.01		ROO.25.37.08.01		ROO.25.37.08.02		ROO.25.37.08.03		ROO.25.37.08.04		ROO.25.37.08.05		ROO.25.37.08.06		ROO.25.37.08.07		ROO.25.37.08.08		ROO.25.37.08.09		ROO.25.37.08.10		ROO.25.37.08.11		ROO.25.37.08.12		ROO.25.37.08.13		ROO.25.37.08.14		ROO.25.37.08.15		ROO.25.37.08.16	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
29	muhammad kholid	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
30	Faricha ayu anggraini	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
31	riko kurnia wati	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
32	edy sunefko	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
33	Ibrahim	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4
34	Setriono	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
35	Kristiawati	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
36	Mauludin Azzori	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
37	Aqus Ahmadi	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
38	Devita mayengari	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
39	Naily Najbah	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
40	Fahri	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4

41	johan heryanto	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
42	Iham	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
43	Eka Agustin	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2	3	2	3	3	2	3	4	4	3	4
44	Ruzatul Makfirah	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
45	Dodik Purniawan	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4

Risiko			Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang Terusun		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOF nya		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Kebenaran Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	
No	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 25.37.08.01		ROO 25.37.08.01		ROO 25.37.08.02		ROO 25.37.08.03		ROO 25.37.08.04		ROO 25.37.08.05		ROO 25.37.08.06		ROO 25.37.08.07		ROO 25.37.08.08		ROO 25.37.08.09		ROO 25.37.08.10		ROO 25.37.08.11		ROO 25.37.08.12		ROO 25.37.08.13		ROO 25.37.08.14		ROO 25.37.08.15		ROO 25.37.08.16			
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan		
46	Heru Setyawan	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4
47	sunu herdanata	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
48	devi sholikhatus ma'rifah	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
49	muhammad rudyanto	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
50	dimas andriyanto	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
51	ahmad feid romdhon	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
52	zulfah	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2	3	3	2	3	4	4	3	4		
53	widia ratna sari	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
54	Nirwono Ingrat	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	5	3	4		
55	Rini Astuti	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4		
Rata-rata			4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	5		

C. MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			<u>Tidak Signifikan</u>	Kecil	Besar	<u>Sangat Signifikan</u>
			1	2	3	4
<u>Kemungkinan Terjadinya Risiko</u>	<u>Hampir Pasti</u>	4			ROO.25.37.08.16	RSO.25.37.08.01 ROO.25.37.08.02 ROO.25.37.08.15
	<u>Kemungkinan Besar</u>	3		ROO.25.37.08.14	ROO.25.37.08.13	ROO.25.37.08.03 ROO.25.37.08.04 ROO.25.37.08.07 ROO.25.37.08.08 ROO.25.37.08.12
	<u>Kemungkinan Kecil</u>	2			ROO.25.37.08.11	ROO.25.37.08.01 ROO.25.37.08.05 ROO.25.37.08.06 ROO.25.37.08.09 ROO.25.37.08.10
	<u>Sangat Jarang</u>	1				

Keterangan :

<u>Sangat Rendah</u>	<u>Rendah</u>	<u>Tinggi</u>	<u>Sangat Tinggi</u>
----------------------	---------------	---------------	----------------------

D. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III Tahun 2025, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan akan dijelaskan di tabel berikut :

Rendahnya triwulan II Tahun 2025, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan akan di lakukan di tabel berikut :										
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:										
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.25.37.08.01	Juni&Juli 2025	Potensi PAD belum tergali secara optimal	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Rendah		Membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan dinamika makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi.	Juni&Juli 2025	November	Sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:										
1	Risiko Keuangan : Rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	ROO.25.37.08.01	Setiap Triwulan 2025	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak Tercapai	-	Sosialisasi kebijakan/nomenklatur baru terkait pajak daerah dan retribusi daerah secara masif, dan monev OPD penghasil secara berkala	Setiap Triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025
2	Risiko Strategis : Penetapan target pajak daerah tidak sesuai dengan	ROO.25.37.08.02	Juni & Juli 2025	Potensi pajak belum tergali secara optimal	Tidak terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak daerah	-	Kerja sama dengan pihak akademis dalam pembuatan kajian ilmiah makroekonomi daerah dalam menetapkan target PAD	Juni & Juli 2025	November 2025	Sedang dilaksanakan kembali untuk menyusun target 2026

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	potensi yang ada dan belum mempertimbangkan makroekonomi daerah secara komprehensif									
3	Risiko operasional : Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.25.37.08.03	Tribulan I (Januari-Maret 2025	Data potensi pajak daerah tidak diupdate secara berkala	Data potensi tidak terupdate	-	Melakukan digitalisasi pendataan objek pajak daerah secara integrasi (bisa berbasis lokasi seperti GIS)	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
4	Risiko Kepatuhan :Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.25.37.08.04	Januari-Desember 2025	Sosialisasi dan kampanye pajak daerah yang dilaksanakan tidak rutin	Wajib pajak belum memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pajak rendah	-	Membuat jadwal dan sosialisasi interaktif dan masif melalui media sosial	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025
5	Risiko Operasional : Kualitas sarana dan prasarana	ROO.25.37.08.05	Januari-Desember 2025	Keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM yang	Sarana tidak bisa digunakan secara maksimal, layanan pajak	-	Mengevaluasi anggaran tahunan dan menetapkan anggaran yang mencakup pengadaan sekaligus pemeliharaan.	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	pajak daerah yang rendah			bisa mengelola peralatan atau sistem.	jadi tidak efektif					
6	Risiko Operasional : Database pajak daerah yang tersusun belum akurat	ROO.25. 37.08.06	Triwulan I (Januari- Maret 2025)	Belum dilaksanak an pemutakhira n data pajak daerah secara berkala	Database objek pajak daerah dan subyek pajak daerah tidak akurat	-	Menyediakan fitur untuk koreksi atau pembaruan data oleh petugas lapangan atau WP secara mandiri dengan otorisasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Triwulan I (Januari- Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
7	Risiko Teknologi Informasi : basis data eror dalam pemetaan zona pajak dan sistem pengamanan minim	ROO.25. 37.08.07	Januari- Desember 2025	Kurangnya SDM kompeten dan anggaran memadai dalam melindungi enkripsi data dan melakukan backup data	Data kena serangan siber dan kesulitan menetapkan target pajak yang realistis.	-	Mengadakan diklat teknis penilaian PBB P- 2	Januari- Desember 2025	Januari, Maret, Juni, Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025
8	Risiko Operasional : Hasil Penilaian NJOP tidak sesuai	ROO.25. 37.08.08	Januari- Desember 2025	Tidak semua objek pajak dilakukan penilaian ke lapangan	Obyek pajak dinilai terlalu rendah	-	Mengembangkan sistem berbasis GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis	Januari- Desember 2025	Januari- Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	dengan harga pasar aktual dan tidak adanya pembaruan zona nilai tanah secara rutin			dan masih kurangnya tenaga penilai PBB						
9	Risi Risiko Strategis : Ketidaktepatan dalam menetapkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	ROO.25.37.08.09	Tribulan 1 (Januari-Maret 2025)	Data wajib pajak belum dimutakhirkan secara berkala (WP yang tidak aktif masih tercantum dalam database)	Ketidaksesuaian database dapat mengganggu pendataan dan perhitungan potensi pajak	-	Perjanjian Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Triwulan 1 (Januari-Maret 2025)	Oktober 2025	Sudah dilaksanakan
10	Risiko Operasional : Sistem pelayanan pajak online terhambat	ROO.25.37.08.10	Januari-Desember 2025	Layanan konsultasi online tidak berjalan dengan baik dan gangguan teknis pada web/aplikasi pajak daerah	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	-	Pemeliharaan sistem berkala, monitoring server secara rutin	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025
11	Risiko Operasional : Pamalsuan	ROO.25.37.08.11	Januari-Desember 2025	Wajib pajak dengan sengaja	Kehilangan potensi penerimaan	-	Petugas diberikan pelatihan berkala tentang penerapan SOP	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Data Pajak dan Risiko Human Error			menyembunyikan atau memalsukan omzet pajak, petugas pajak salah menghitung, menginput dan verifikasi data pajak	pajak dan data menjadi tidak balance		Pengawasan Pajak Daerah			kembali di TW IV 2025
12	Risiko Kepatuhan: Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.25.37.08.12	Setiap triwulan 2025	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Target pajak daerah tidak tercapai dan meningkatnya piutang pajak daerah	-	Memberikan insentif fiskal dan sanksi untuk keterlambatan pembayaran	Setiap triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025
13	Risiko Operasional : Keterlambatan proses penanganan keberatan dan pengurangan pajak daerah	ROO.25.37.08.13	Januari-Desember 2025	Kurangnya SDM Penelaah Keberatan Pajak Daerah	Berkas keberatan tidak segera terselesaikan	-	Menambah SDM dalam menangani keberatan dan pengurangan pajak daerah	Januari-Desember 2025	Januari 2025	Sudah dilaksanakan
14	Risiko	ROO.25.	Januari-	Wajib pajak	Pemeriksaan		Penetapan sanksi	Januari-	Januari-	Sudah dilaksanakan di

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Operasional : Tidak kooperatifnya wajib pajak, dan keterbatasan SDM Pemeriksa dan Pengawasan Pajak	37.08.14	Desember 2025	menolak diperiksa, memanipulasi omzet dan kurangnya SDM Pemeriksa Pajak Daerah yang bersertifikat karena terbatasnya anggaran	Pajak terhambat dan tidak menyeluruh sehingga kehilangan potensi penerimaan pajak		administratif secara tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan pelatihan terhadap SDM pemeriksa dan pengawasan secara merata	Desember 2025	Desember 2025	TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025
15	Risiko Kemitraan : Lemahnya Pengawasan Retribusi Daerah	ROO.25. 37.08.15	Januari-Desember 2025	OPD Penghasil kurang mengupdate pengembangan tarif retribusi, aset retribusi belum di appraisal secara rutin, kurang maksimalnya pelayanan	Potensi retribusi berkurang dan pengelolaan tidak sesuai produk hukum		Pengembangan sistem pembayaran digital untuk pembayaran semua retribusi daerah	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
16	Risiko Kepatuhan : Penolakan atau resistensi terhadap penggunaan sistem elektronifikasi perpajakan daerah	ROO.25. 37.08.16	Januari- Desember 2025	Kesadaran wajib pajak akan pembayaran digital masih rendah	Tidak tercapainya optimalisasi elektronifikasi pada semua lini transaksi PAD		Menyediakan SDM IT pendamping untuk membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Januari- Desember 2025	Januari- Desember 2025	Sudah dilaksanakan di TW II dan TW III 2025, akan dilaksanakan kembali di TW IV 2025

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya GAP antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Kurangnya petugas dalam memahami konsep dan manfaat manajemen risiko masing-masing
2. Budaya sadar risiko belum terbentuk. Dalam pelaksanaannya, masih ada kecenderungan bekerja secara rutinitas tanpa mempertimbangkan potensi risiko. Risiko baru diperhatikan ketika masalah sudah terjadi, bukan dicegah sejak awal.
3. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
4. Data potensi pajak belum *ter-update* secara berkala karena keterbatasan anggaran
5. Keterbatasan SDM Pemeriksa dan Pengawasan Pajak
6. OPD Penghasil kurang mengupdate pengembangan tarif retribusi
7. Sarana dan prasarana kurang optimal
8. Terdapat wajib pajak resistensi terhadap elektronifikasi transaksi pajak daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III Tahun 2025 dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak, menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai (aplikasi, transportasi, sistem yang unggul dan terenkripsi secara aman) untuk mendukung penagihan pajak dan pendataan pajak yang efektif, menyusun target PAD dengan melihat kebijakan makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi, memasifkan penyuluhan kepada wajib pajak untuk membayar pajak daerah secara digital sehingga target Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai. Selain itu, *update* perkembangan tarif retribusi dan *appraisal* asset retribusi secara rutin sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Upaya – upaya ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan rencana tindak pengendalian risiko yang lebih masif dan optimal lagi.

